

**PENGARUH KINERJA KOMITE AUDIT
TERHADAP MANAJEMEN LABA (DENGAN
MENGUNAKAN *EARNING RESTATEMENT*
SEBAGAI PROKSI DARI MANAJEMEN LABA)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

PRAWITA MANDHEGA RANI
NIM. C2C007102

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2011

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Prawita Mandhega Rani
Nomor Induk Mahasiswa : C2C007102
Fakultas / Jurusan : Ekonomi / Akuntansi
Judul Skripsi : **PENGARUH KINERJA KOMITE AUDIT
TERHADAP MANAJEMEN LABA (DENGAN
MENGUNAKAN *EARNING*
RESTATEMENT SEBAGAI PROKSI
MANAJEMEN LABA)**
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. H. Muchamad Syafruddin, M. Si., Akt.

Semarang, 28 Juni 2011

Dosen Pembimbing,

(Prof. Dr. H. Muchamad Syafruddin, M. Si., Akt)

NIP. 19620416 198803 1003

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Prawita Mandhega Rani
Nomor Induk Mahasiswa : C2C007102
Fakultas / Jurusan : Ekonomi / Akuntansi
Judul Skripsi : **PENGARUH KINERJA KOMITE AUDIT
TERHADAP MANAJEMEN LABA (DENGAN
MENGUNAKAN *EARNING*
RESTATEMENT SEBAGAI PROKSI
MANAJEMEN LABA)**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 2 Agustus 2011

Tim Penguji

1. Prof.Dr.H. Muchamad Syafruddin, MSi,Akt. (.....)
2. Dr.H. Agus Purwanto, SE,MSi,Akt. (.....)
3. Surya Raharja,SE,MSi,Akt. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Prawita Mandhega Rani, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **Pengaruh Kinerja Komite Audit Terhadap Manajemen Laba (dengan Menggunakan *Earning Restatement* sebagai Proksi Manajemen Laba)**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 28 Juni 2011
Yang membuat pernyataan,

(Prawita Mandhega Rani)

NIM. C2C007102

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the effect of audit committee performance on earning management by using earning restatement as a proxy of earning management. Audit committee characteristics used in this study are audit committee independence, size of audit committee, financial expertise audit committee member and the meetings of the audit committee.

This study use data from 40 BEI (Indonesia Stock exchange) listed companies in 2005 until 2009. Then, collected data are analyzed by using logistic regression analysis.

The results of this study indicate that audit committee independence was significantly negative effect on the occurrence of earnings restatement. While, on the other audit committee characteristics, this study have no evidence that there is significant influence between the characteristics of the earnings restatement.

Keywords: Audit Committee, Corporate Governance, Earning Restatement

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kinerja komite audit terhadap manajemen laba dengan menggunakan *earning restatement* sebagai proksi dari manajemen laba. Karakteristik komite audit yang digunakan dalam penelitian ini adalah independensi komite audit, ukuran komite audit, keahlian di bidang keuangan komite audit dan pertemuan (rapat) komite audit.

Penelitian ini menggunakan data dari 40 perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2005-2009. sampel kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis regresi logistik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa independensi komite audit secara signifikan berpengaruh negatif terhadap keterjadian *earning restatement*. Sedangkan pada karakteristik komite audit yang lain, penelitian ini tidak memperoleh bukti bahwa ada pengaruh signifikan antara karakteristik tersebut dengan *earning restatement*.

Kata Kunci: Komite Audit, Corporate Governance, *Earning Restatement*

MOTTO

Seven Social Sins

Politics without principle

Wealth without work

Pleasure without conscience

Knowledge without character

Commerce without morality

Science without humanity

Worship without sacrifice

Quoted by Mahatma Gandhi

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “**Pengaruh Kinerja Komite Audit Terhadap Manajemen Laba (dengan Menggunakan *Earning Restatement* sebagai Proksi Manajemen Laba)**”.

Selama proses penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. H. M. Nasir, M. Si, Akt., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
2. Bapak Prof. Dr. H. Muchamad Syafruddin, M.Si., Akt., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Bapak Surya Raharja, SE., M.Si., Akt., selaku dosen wali.
4. Seluruh dosen dan segenap staf Akuntansi Reguler 1 atas ilmu dan bantuan yang telah diberikan.
5. Teruntuk Papa, Margono, S. IP dan Mama, Lisnani, SE, “Pemberian dari Vita ini mungkin masih belum sebanding dengan apa yang Papa Mama beri untuk Vita. Tapi melalui pemberian ini, semoga bisa memenuhi rasa syukur dalam hati Papa Mama. Dan melalui pemberian ini pula, Vita, putri

kalian, mengharapkan selalu curahan doa, restu dan ridho dari Papa dan Mama.”

6. Teruntuk adekku sayang, Rika Mandhega Vimastalia, yang rajin memberikan motivasi dengan berbagai cara yang dihalalkan, “Makasih ya Dek, atas doanya, atas motivasinya, atas omelannya juga tentunya.. Cepet nyusul nylesein kuliahnya. Semoga Allah selalu memudahkan dan melancarkan segala urusan adek.”
7. Teruntuk Mbah Kakung dan Mbah Putri, yang selalu jadi *charger* semangat. “Nyuwun pangestunipun Mbah..”.
8. Teruntuk my beloved family. Tante Rini, Dek Devi, Dek Farid, Dek Maya, Mbak Upik, Mas Krisna, Dek Vira, Dek Ovi, Pakde-Pakde, Budhe-Budhe, Om, Oma, Mbak Ti, terima kasih buat doanya, terima kasih sudah slalu memberikan kenyamanan bagi Vita dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Teruntuk My Beloved Friends, Rallya Luthfita Meinurdini sekeluarga, terima kasih buat kebersamaannya. Sebuah kebersamaan besar dan semoga Allah akan selalu menjaga persaudaraan ini.
10. Teruntuk My ex.Roomates, Anggie, Ayu Septi Anggaeni, satu-satunya temen sanguin melankolis yang paling Vita sayang. Tempat curhat, tempat merasionalkan pikiran, tempat *bermenye-menye*, tempat belajar. Semoga Allah menjaga persaudaraan ini.
11. *Special* untuk Nindya Intan Putri yang selalu menemani bimbingan, selalu memberi semangat dan tempat bertukar pikiran. Dan untuk Adhitya Wahyu Ramadhan yang selalu siap menerima kerepotan dari Vita dan

menjadi teman di segala kondisi, waktu dan tempat. Jika Vita belum bisa membalas kebaikan kalian, semoga Allah yang akan mencukupkannya.

12. Buat temen-temen berharga yang lain Nitiya, Tia, Mas Arie, Amel, Adi, Tegar, Dila yang selalu rajin kasih Vita nasehat dan mengingatkan tentang segala hal yang penuh dengan kebaikan, terima kasih.. *“Mungkin kita bisa melupakan orang yang tertawa bersama kita, tapi kita tidak akan melupakan orang yang ada saat kita menangis.”*

13. Teruntuk temen-temen akuntansi 2007, Tim KKN Panggung Kidul, My OldBBF (Fariz, Sukma, Risa, Ayu, Wahyu, Ucha, Julia, Nina), temen-temen seperjuangan lain dan pihak-pihak lain yang mungkin belum sempat saya tulis, terima kasih atas kebersamaan dan doanya.

14. Terakhir, untuk seseorang yang selalu mendoakan kebahagiaan dan kebaikan untuk Vita, terima kasih, doanya selalu terasa lebih dekat..(^_^)(>,<).

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Penulis sangat mengharapkan atas masukan saran dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 28 Juni 2011

Penulis

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TELAAH PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu.....	11
2.1.1 Laporan Keuangan.....	11
2.1.2 Teori Keagenan.....	13
2.1.3 <i>Earning Management</i>	17

2.1.4	<i>Good Corporate Governance</i>	24
2.1.5	Komite Audit	27
2.1.5.1	Karakteristik Komite Audit.....	28
2.1.5.2	Independensi Komite Audit	29
2.1.5.3	Ukuran Komite Audit.....	30
2.1.5.4	Keahlian Keuangan Komite Audit	30
2.1.5.5	Pertemuan Komite Audit.....	31
2.1.6	Penelitian Terdahulu	32
2.2	Kerangka Pemikiran	37
2.3	Pengembangan Hipotesis.....	38
2.3.1	Independensi dan Keterjadian <i>Earning Restatement</i>	38
2.3.2	Ukuran Komite Audit dan Keterjadian <i>Earning Restatement</i>	39
2.3.3	Keahlian Keuangan Komite Audit dan Keterjadian <i>Earning Restatement</i>	40
2.3.4	Pertemuan Komite Audit dan Keterjadian <i>Earning Restatement</i>	40
BAB III	METODE PENELITIAN	42
3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	42
3.1.1	<i>Dependent Variable</i> (Variabel Terikat).....	42
3.1.2	Variabel Bebas (<i>Independent variable</i>).....	43
3.1.2.1	Independensi Komite Audit (INDD).....	44
3.1.2.2	Ukuran Komite Audit (SIZE).....	44
3.1.2.3	Keahlian di Bidang Keuangan (FINEX)	44
3.1.2.4	Frekuensi Pertemuan (Rapat) Komite Audit.....	45
3.1.3	Variabel Kontrol	45
3.1.3.1	Auditor Big'4 dan non-Big'4	46
3.1.3.2	Arus Kas dari Aktivitas Operasi/ <i>Cash Flow</i>	

<i>Operating Activity</i> (CFO), Total Akruai (TAcc), Absolute Value CFO dan Absolute Value Total Akruai	46
3.2 Populasi dan Sampel.....	46
3.3 Jenis dan Sumber Data	47
3.4 Metode Pengumpulan Data	48
3.5 Metode Analisis Data	48
3.5.1 Statistik Deskriptif	48
3.5.2 Pengujian Hipotesis	48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	53
4.1 Deskripsi Variabel.....	54
4.1.1 Earning Restatement.....	54
4.1.2 Independensi Komite Audit.....	54
4.1.3 Ukuran Komite Audit	56
4.1.4 Keahlian di Bidang Keuangan.....	57
4.1.5 Pertemuan (rapat) Komite Audit	58
4.1.6 Variabel Kontrol Tipe Auditor	59
4.1.7 Variabel Kontrol Arus Kas Operasi, Total Akruai, Nilai Absolute Arus Kas Operasi dan Nilai Absolute Total Akruai.....	60
4.2 Analisis Data	61
4.2.1 <i>Goodness of Fit Test</i>	61
4.2.2 <i>Overall Fit Test</i>	62
4.2.2.1 <i>Chi Square Test</i>	62
4.2.2.2 <i>Cox & Snell R Square dan Nagelkerke R Square</i>	64
4.2.2.3 Tabel Klasifikasi	65

4.3 Pengujian Hipotesis	66
4.4 Pembahasan	69
4.4.1 Independensi Komite Audit dan <i>Earning Restatement</i>	69
4.4.2 Ukuran Komite Audit dan <i>Earning Restatement</i>	70
4.4.3 Financial Expetise dan <i>Earning Restatement</i>	71
4.4.4 Pertemuan (rapat) Komite Audit dan <i>Earning Restatement</i>	72
BAB V PENUTUP	74
5.1 Kesimpulan	74
5.2 Keterbatasan dan Saran	75
5.2.1 Keterbatasan	75
5.2.2 Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	34
Tabel 4.2 Spesifikasi Sampel	53
Tabel 4.3 <i>Earning Restatement</i>	54
Tabel 4.4 Statistik Deskriptif Independensi Komite Audit.....	55
Tabel 4.5 Statistik Deskriptif Ukuran Komite Audit	56
Tabel 4.6 Statistik Deskriptif <i>Financial Expertise</i> Komite Audit.....	57
Tabel 4.7 Statistik Deskriptif Pertemuan (rapat) Komite Audit	58
Tabel 4.8 Statistik Deskriptif Tipe Auditor.....	59
Tabel 4.9 Statistik Diskriptif Variabel Kontrol Arus Kas Operasi dan Total AkruaI	60
Tabel 4.10 <i>Hosmer Lameshow Test</i>	62
Tabel 4.11 <i>Likelihood Overall Fit</i>	63
Tabel 4.12 <i>Omnibus Test of Model Coefficient</i>	64
Tabel 4.13 <i>Cox & Snell R Square dan Nagelkerke R Square</i>	65
Tabel 4.14 Tabel Klasifikasi	65
Tabel 4.15 <i>Variables in The Equation</i>	67

DAFTAR GAMBAR

halaman

Gambar 2.1 Kerangka Hipotesis	38
-------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

	halaman
Lampiran A Hasil Match-Pair Perusahaan.....	80
Lampiran B Tabulasi Data	81
Lampiran C Hasil Ouput SPSS	83

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Isu tata kelola perusahaan mulai berkembang sejak adanya krisis keuangan yang terjadi pada tahun 1997. Krisis keuangan yang tidak hanya menyerang Indonesia tetapi juga menyerang negara-negara di Asia ini dipandang sebagai akibat dari lemahnya praktik *Good Corporate Governance* di negara-negara Asia (Arifin, 2005).

Kebutuhan akan *Good Corporate Governance* ini semakin menarik perhatian terutama sejak mencuatnya skandal akuntansi yang dilakukan oleh Enron dan Kantor Akuntan Big 5, Arthur Anderson. Adanya skandal ini akhirnya memunculkan kasus-kasus lain yang juga dilakukan oleh perusahaan *high profile* seperti WorldCom, Healthsouth dan Tyco. Di Indonesia, juga terjadi beberapa kasus yang mengindikasikan lemahnya penerapan *Good Corporate Governance* seperti kasus pada PT. Kimia Farma yang melakukan pengelembungan (*overstated*) laba perusahaan dalam laporan keuangan 2001 (Tempo, 2002). Kasus ini juga mengakibatkan penjatuhan sanksi kepada auditor PT. Kimia Farma karena atas risiko audit yang tidak berhasil mendeteksi adanya pengelembungan laba tersebut, meskipun telah melakukan prosedur audit sesuai SPAP (Bapepam, 2002).

Berbagai upaya dalam penegakan *Good Corporate Governance* telah dipionerkan oleh beberapa negara maju seperti Inggris dan Amerika. Pada tahun

1992 di Inggris, terbentuk Cadbury Committee yang memberikan beberapa rekomendasi dalam menerapkan *corporate governance*. Rekomendasi ini terangkum dalam laporan yang berjudul *The Financial Aspect of the Corporate Governance*. Sedangkan di Amerika, terdapat 10 rekomendasi mengenai *corporate governance* dibuat oleh Blue Ribbon Committee pada tahun 1999 (BRC, 1999).

Di Indonesia, pada tahun 2001, Komite Nasional Kebijakan Governance membuat suatu pedoman *good corporate governance* dimana pedoman ini disempurnakan pada tahun 2006. Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan acuan dasar tentang konsep dan pola pelaksanaan GCG (KNKG, 2001). Dalam pedoman tersebut, terdapat pedoman untuk pembentukan beberapa komite yang dibentuk oleh dewan komisaris, salah satunya adalah komite audit.

Komite Audit dibedakan menjadi tiga hal atau karakteristik yaitu komite audit untuk perbankan, BUMN, dan perusahaan publik (Effendi, 2005). Pada kategori perbankan, peraturan tentang komite audit, dalam perbankan disebut dengan Dewan Audit, diatur dalam Surat Keputusan Bank Indonesia No. 27/163/KEP/DIR/1995 tanggal 31 Maret 1995 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 27/8/UPPB/1995 tanggal 31 Maret 1995. Pada perusahaan BUMN hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang BUMN. Sedangkan pada perusahaan publik ketentuan komite audit diatur dalam Surat Edaran Bapepam Nomor SE03/PM/2000 tertanggal 05 Mei 2000.

Berdasarkan beberapa regulasi-regulasi di atas, Komite Nasional Good Corporate Governance membentuk Task Force Komite Audit untuk membuat suatu pedoman mengenai komite audit di Indonesia. Pada tanggal 2 Mei 2002, Task Force Komite Audit berhasil membuat “Pedoman Pembentukan Komite Audit yang Efektif”, yang didalamnya dijelaskan tentang ketentuan-ketentuan umum suatu komite audit.

Komite Audit yang efektif bekerja sebagai alat untuk meningkatkan efektivitas, tanggung jawab, dan keterbukaan Dewan Komisaris. Tugas utama komite audit adalah memeriksa dan mengawasi proses pelaporan keuangan dan kontrol internal (KNCG, 2002). Komite audit diangkat oleh Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Suatu komite audit ketua oleh seorang Komisaris Independen dan setidaknya-tidaknya memiliki 2 orang anggota.

Dalam melakukan penilaian terhadap kinerja komite audit, terdapat beberapa karakteristik komite audit yang bisa digunakan sebagai parameter kinerja. Karakteristik tersebut antara lain struktur komite audit (meliputi independensi, ukuran), pelatihan dan pemahaman komite audit, frekuensi pertemuan dan rapat komite audit, kegiatan komite audit, hubungan komite audit dengan auditor internal, akuntan publik dan manajemen dan peranan komite audit dimasa depan (KNKG).

Salah satu karakteristik krusial yang sangat diperlukan oleh komite audit adalah independensi. Independensi diperlukan untuk menilai kinerja auditor internal, mengatasi konflik auditor eksternal (Agrawal *et al.*, 2005) dan untuk menilai objektivitas dan independensi auditor eksternal (IKAI, 2004).

Karakteristik lain yang diperlukan adalah adanya *financial expertise*, jumlah rapat dan ukuran komite audit. *Financial expertise* diperlukan dalam suatu komite audit, karena hal ini terkait dengan tujuan komite audit yaitu memeriksa dan mengawasi proses pelaporan keuangan. Sedangkan untuk mengukur tingkat kerajinan komite audit bisa digunakan parameter jumlah rapat yang dilakukan komite audit selama satu periode (IKAI, 2004). Dan supaya keanggotaan komite audit lebih efektif lagi, KNKG merekomendasikan jumlah anggota komite audit adalah sebanyak 3-5 orang.

Dalam perkembangannya, sorotan mengenai komite audit semakin berkembang. Peran komite audit dalam upaya untuk menjamin kualitas dari pelaporan keuangan perusahaan telah menjadi suatu pertimbangan yang berarti, terutama setelah maraknya tindakan manajemen laba yang dilakukan pihak manajemen perusahaan dan skandal akuntansi yang terjadi pada beberapa perusahaan besar di dunia (Lin et.al., 2006), termasuk di Indonesia. Tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen perusahaan ini dipicu sejak adanya pengaitan antara nilai perusahaan dengan pelaporan laba, yang selanjutnya hal ini memunculkan insentif ekonomi dan tekanan terhadap manajemen perusahaan supaya dapat menyajikan laba yang baik (Lin et.al., 2006).

Manajemen laba dapat diartikan sebagai salah satu tindakan yang dilakukan manager dengan memanfaatkan adanya asimetri informasi dan munculnya perilaku oportunistik untuk memaksimalkan kesejahteraan dengan cara memodifikasi laba. Terdapat tiga hipotesis motivasi manajemen dalam melakukan manajemen laba yang dikemukakan oleh Zimmerman yaitu *Bonus*

Plan Hypothesis, *Debt (Equity) Hypothesis* dan *Political Cost Hypothesis*. Dalam *Bonus Plan Hypothesis*, manajemen akan cenderung meningkatkan laba untuk memperoleh insentif yang besar. Manajemen melakukan penangguhan pembayaran hutang jika termotivasi oleh *Debt (Equity) Hypothesis*. Dan manajemen akan cenderung menurunkan laba untuk menghindari *Political Cost* seperti pajak.

Tindakan manajemen laba ini tentu akan merugikan pihak pengguna laporan keuangan, sebab salah satu tujuan pelaporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan yang dapat menunjukkan prestasi perusahaan dalam menghasilkan laba (Ghozali dan Anis, 2007). Manajemen laba dapat membiaskan informasi tersebut sehingga mengurangi relevansi dan keandalan dari informasi keuangan tersebut, terutama informasi mengenai laba perusahaan.

Beberapa penelitian telah meneliti keefektifan Komite Audit dalam membatasi tindakan manajemen laba (Klein, 2000; Zhou, 2004; Agrawal, 2005; Lin *et al.*, 2006; Carcello, 2008; Trihartati, 2008). Agrawal (2005) meneliti mekanisme *corporate governance* terhadap penyajian kembali laba perusahaan dan tidak ditemukan adanya hubungan antara kedua variabel tersebut. Begitu juga dengan Carcello (2008) yang menguji antara keahlian keuangan komite audit terhadap manajemen laba. Carcello menemukan bahwa tidak terdapat asosiasi antara keahlian keuangan dengan manajemen laba.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, Zhou (2004) yang meneliti manajemen laba di sektor perbankan menemukan bahwa terdapat hubungan

negatif antara jumlah pertemuan komite audit, keahlian tata kelola komite audit dan jumlah pertemuan komite audit dengan direksi terhadap manajemen laba.

Di Indonesia, penelitian tentang manajemen laba sudah mulai dilakukan. Suaryana (2005) menemukan bahwa koefisien respon laba perusahaan yang memiliki komite audit lebih besar daripada perusahaan yang tidak memiliki komite audit. Koefisien respon laba ini merupakan suatu bentuk penilaian pasar terhadap laba yang dilaporkan perusahaan. Jadi, jika koefisien respon laba perusahaan yang memiliki komite audit lebih besar daripada koefisien respon laba perusahaan yang tidak memiliki komite audit, dapat diartikan bahwa laba yang dilaporkan perusahaan dengan komite audit dinilai lebih baik kualitasnya daripada perusahaan yang tidak memiliki komite audit (Suaryana, 2005).

Trihartati (2008) menguji pengaruh karakteristik komite audit terhadap manajemen laba. Pada penelitian ini, diskresioner akrual dipilih sebagai proksi dari manajemen laba. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa independensi secara signifikan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

Dari beberapa penelitian sebelumnya, sebagian peneliti menggunakan diskresioner akrual sebagai proksi dari manajemen laba, dan ada pula yang menggunakan penyajian kembali laba (*earning restatement*) sebagai proksi dari manajemen laba. Sedangkan pada penelitian ini, menggunakan *earning restatement* sebagai proksi dari manajemen laba.

Penggunaan *earning restatement* ini dikarenakan *earning restatement* merupakan proksi manajemen laba yang lebih mudah diobservasi dan merupakan hasil dari manajemen laba yang agresif (Lin *et.al.*, 2006). Mengutip dua argumen

yang dikemukakan oleh Zoe-Vonna Palmrose dan Susan (2004) dalam Agrawal dan Chada (2005) tentang penggunaan *earning restatement* sebagai proksi manajemen laba adalah, yang pertama, *earning restatement* merupakan kegiatan yang langka dilakukan perusahaan. *Earning restatement* tidak seperti diskresioner akrual, dimana kegiatan perusahaan rutin berkaitan dengan diskresioner akrual. Yang kedua, keterjadian dari *earning restatement* adalah suatu konstruksi yang akademis dalam memanipulasi laba. “Tak ada asap tanpa api”, hal ini menunjukkan bahwa laba memang dimanipulasi oleh manajemen.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis bermaksud melakukan penelitian yang berjudul “**Pengaruh Kinerja Komite Audit Terhadap Manajemen Laba (dengan Menggunakan *Earning Restatement* Sebagai Proksi Dari Manajemen Laba)**”. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris tentang hubungan beberapa karakteristik komite audit terhadap manajemen laba.

1.2. Masalah dan batasan penelitian

Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh antara independensi komite audit dengan keterjadian penyajian kembali laba?
2. Apakah terdapat pengaruh antara ukuran komite audit dengan keterjadian penyajian kembali laba?
3. Apakah terdapat pengaruh antara keahlian keuangan yang dimiliki komite audit dengan keterjadian penyajian kembali laba?

4. Apakah terdapat pengaruh antara pertemuan komite audit dengan keterjadian penyajian kembali laba?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh antara independensi komite audit dengan keterjadian penyajian kembali laba.
2. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh antara ukuran komite audit dengan keterjadian penyajian kembali laba.
3. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh antara keahlian keuangan yang dimiliki komite audit dengan keterjadian penyajian kembali laba.
4. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh antara pertemuan komite audit dengan keterjadian penyajian kembali laba.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain sebagai berikut:

1. Bagi kalangan akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bagian dari bahan kajian referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya.
2. Bagi kalangan regulator, penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana untuk mengevaluasi dan mengefektifkan pengawasan manajemen demi terwujudnya *good corporate governance*.

1.4. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terbagi menjadi lima bab dan setiap babnya terbagi menjadi beberapa sub bab. Secara garis besar, pembahasan dari bab-bab tersebut dijelaskan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bab pertama dalam penulisan penelitian ini. Pada bagian ini dijelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Pada bagian ini berisi tentang landasan teori yang melandasi penelitian dalam melakukan analisa terhadap permasalahan yang ada, bahasan penelitian sebelumnya, hipotesis dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bagian ini berisi deskripsi tentang bagaimana penelitian ini akan dilaksanakan secara operasional. Oleh karena itu, pada bagian ini diuraikan perihal variabel penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis.

BAB IV : HASIL DAN ANALIS

Bab ini berisi tentang deskripsi objek penelitian, analisis kuantitatif, interpretasi hasil dan argumentasi terhadap hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir. Dalam bab ini memuat simpulan, keterbatasan penelitian dan saran.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1. Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1. Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan media yang digunakan oleh pihak penyaji laporan keuangan kepada pihak pengguna laporan keuangan untuk menyampaikan informasi keuangan perusahaan dalam upaya pembuatan keputusan oleh pengguna laporan keuangan.

Menurut PSAK no. 1, laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan dari laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Menurut George J. Benston dalam Robert Bloom (1987) menjelaskan bahwa laporan keuangan dihasilkan untuk pertimbangan dimana didalamnya termasuk mengomunikasikan dengan kreditor dan investor prospektif dan memungkinkan untuk persetujuan dengan perserikatan buruh dan atau tenaga kerja secara langsung. Laporan keuangan didefinisikan sebagai bagian dari pelaporan keuangan, tidak ada batasan yang disediakan dalam angka dari

pelaporan keuangan yang mungkin salah satunya terdapat dalam laporan keuangan (Bloom, 1987).

Berdasarkan PSAK no. 1, laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen berikut ini:

- a. Neraca;
- b. Laporan laba rugi;
- c. Laporan perubahan ekuitas;
- d. Laporan arus kas;
- e. Catatan atas laporan keuangan

Suatu informasi laporan keuangan juga dikatakan berkualitas apabila mampu memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu relevan terhadap kebutuhan pengguna laporan untuk pengambilan keputusan dan dapat diandalkan.

Informasi yang relevan adalah informasi yang mempunyai hubungan dengan masalah yang dihadapi. Informasi dapat mempunyai suatu hubungan sedikitnya dengan tiga cara yaitu dengan mempengaruhi tujuan, dengan mempengaruhi pemahaman, dan dengan mempengaruhi keputusan (Hendriksen, 1992). Informasi dikatakan relevan jika informasi tersebut mampu membuat perbedaan dalam keputusan (Kieso, 2007). Adapun unsur-unsur relevansi adalah adanya *Predictive Value* (Nilai Peramalan), *Feedback Value* (Nilai Umpan balik), dan *Timeliness* (Ketepatan waktu).

Reliabilitas atau keandalan juga merupakan karakteristik khusus dalam laporan keuangan. Informasi dikatakan andal jika informasi tersebut dapat

diverifikasi, disajikan dengan jujur, dan bebas dari bias (Kieso, 2007). PSAK no.

1 mengartikan keandalan sebagai:

- a. Mencerminkan kejujuran penyajian hasil dan posisi keuangan perusahaan;
- b. Menggambarkan substansi ekonomi dari suatu kejadian atau transaksi dan tidak semata-mata bentuk hukumnya;
- c. Netral yaitu bebas dari keberpihakan;
- d. Mencerminkan kehati-hatian; dan
- e. Mencakup semua hal yang material.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, terdapat hubungan antara keandalan dengan materialitas. Sesuatu informasi dikatakan material jika apabila terjadi perubahan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut akan mempengaruhi pengambilan keputusan. Materialitas juga bisa berhubungan dengan pentingnya perubahan nilai, perbaikan kesalahan dalam laporan sebelumnya, atau pada beberapa sarana pengungkapan data yang dikuantifikasikan dan penjelasan atau kualifikasi data ini yang relevan (Hendriksen, 1992). Perubahan, perbaikan, dan penjelasan harus dianggap material jika cukup besar atau cukup penting untuk mempengaruhi keputusan pemakai laporan keuangan.

2.1.2. Teori agensi

Agency Theory atau Teori Keagenan dikemukakan oleh Jensen dan Mackling pada tahun 1976. Teori ini menjelaskan adanya pemisahan antara kepemilikan (*ownership*) dan pengendalian (*control*) dalam suatu perusahaan. Hubungan agensi ini didefinisikan sebagai kontrak antara satu atau lebih orang, dimana *principal* mengikat orang lain (*agent*) untuk melakukan pelayanan sesuai

kepentingan *principal* yang melibatkan pendelegasian beberapa otoritas untuk membuat keputusan bagi agen (Jensen dan Meckling, 1976). *Principal*, disebut juga pemberi wewenang, dapat diartikan sebagai pemilik perusahaan atau pemegang saham dan agen adalah, pihak yang diberi wewenang, dapat diartikan sebagai manajemen yang mengelola perusahaan. Berdasarkan teori dijelaskan bahwa pihak manajemen dalam bekerja menjalankan perusahaan harus mengutamakan kesejahteraan pemilik perusahaan.

Principal akan selalu tertarik pada hasil yang dihasilkan oleh *agent*. Oleh karena itu teori keagenan memberikan tiang pokok bagi peranan penting akuntansi dalam menyediakan informasi setelah suatu kejadian yang disebut sebagai peranan pascakeputusan (Hendriksen, 1992). Peran ini seringkali diasosiasikan dengan peran pengurusan (*stewardship*) akuntansi, dimana seorang agen melapor kepada *principal* tentang kejadian-kejadian dalam periode lalu. Inilah yang memberi akuntansi nilai umpan baliknya selain nilai peramalannya (Hendriksen, 1992).

Namun, ketika pemilik perusahaan dengan pihak manajemen memiliki kepentingan yang berbeda, dapat diartikan dengan ingin memaksimalkan kesejahteraan masing-masing, maka timbullah konflik keagenan. Jensen dan Meckling menyatakan, "*If both parties to the relationship are utility maximizers, there is a good reason to believe that the agent will not always act in the best interests of the principal (Jensen dan Meckling, 1976).*"

Jika Jensen dan Meckling menyatakan tentang adanya pemaksimalan utilitas, Eisenhardt (1989) berpendapat bahwa terdapat dua permasalahan yang

mungkin muncul dalam hubungan keagenan. Eisenhardt (1989) menyatakan bahwa masalah keagenan muncul ketika, yang pertama, tujuan dari principal dan agen bertentangan dan adanya kesulitan bagi principal untuk menverifikasi apa yang sebenarnya dilakukan oleh agen. Kedua, adalah permasalahan pembagian risiko yang mungkin muncul ketika principal dan agen memiliki perilaku berbeda terhadap risiko.

Eisenhardt (1989) menyatakan hubungan antara teori keagenan dengan *human behavior*. Teori Keagenan menggunakan tiga asumsi *human behavior* yaitu:

- Keterbatasan rasionalitas,
- Oportunisme, dan
- Menghindari risiko.

Keterbatasan rasionalitas mengasumsikan bahwa pembuat keputusan memiliki rasionalitas yang terbatas ketika membuat keputusan karena kendala pada kemampuan kognitif mereka. Simon (1972) dalam Trybou *et al.*,(2010) membedakan tiga keterbatasan rasionalitas yang dapat mempengaruhi perilaku manusia yaitu konsekuensi pasti dari keputusan, informasi yang tidak lengkap tentang alternatif, dan kompleksitas dari situasi ekonomi.

Pada asumsi oportunisme, di sini *agent* akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan melakukan tindakan *moral hazard*. Jika *principal* tidak dapat menentukan apakah *agent* telah berperilaku secara tepat (karena informasi atau asimetri pengetahuan) dan *principal* tidak dapat menyediakan kepentingan pribadi *agent*, *agent* mungkin tidak akan berperilaku seperti apa yang

telah disepakati. *Moral hazard* mengacu pada kurangnya usaha dari pihak *agen*. Argumentasi di sini adalah *agen* kemungkinan tidak mengemukakan sebagaimana usaha yang telah disepakati yang disebut juga dengan kelalaian (Eisenhardt, 1989).

Asumsi ketiga, menghindari risiko, *agent* dianggap lebih menolak risiko daripada *principal* karena adanya ketidakmampuan untuk mendiversifikasi risiko yang dihadapi (Pontes (1995) dalam Trybou *et al.*,(2010)).

Dalam Teori Keagenan, terdapat dua konflik potensial kepentingan yang mungkin muncul yaitu konflik antara *shareholder* dengan manager dan *shareholder* dengan *bondholder*. Untuk mengatasi atau meminimalisasi konflik keagenan tersebut akan menimbulkan biaya. Biaya ini yang disebut dengan biaya keagenan. Dihubungkan dengan konflik keagenan, konflik antara *shareholder* dengan manager akan meningkatkan biaya keagenan terhadap ekuitas. Sedangkan konflik antara *shareholder* dengan *bondholder* akan meningkatkan biaya keagenan terhadap hutang. Biaya agensi tersebut terdiri dari *residual loss*, *bonding expenditure* oleh agen, dan *monitoring expenditure* oleh *principal*. Purwati (2006) menjelaskan biaya-biaya agensi yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) sebagai berikut:

a. *Monitoring Cost*

Monitoring Cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh *principals* untuk mengukur, mengamati, dan mengontrol perilaku manager. Dalam hal ini, termasuk biaya audit, rencana kompensasi eksekutif dan biaya untuk memberhentikan manager.

b. *Bonding Cost*

Bonding Cost adalah biaya pengikatan *agent* agar *agent* bertindak yang terbaik untuk kepentingan pemilik perusahaan. Para *agent* akan diberi kompensasi yang wajar dan bila mereka tidak bertindak sesuai dengan keinginan pemilik kompensasi tersebut tidak akan diberikan.

c. *Residual Loss*

Meskipun sudah ada *monitoring* dan *bonding*, kadang kepentingan *shareholders* dan *agents* masih sulit diselaraskan karena itu muncul *agency losses* dari perbedaan kepentingan tersebut dan ini disebut *residual loss*. *Residual loss* menunjukkan *tradeoff* antara membatasi manajer dan memaksakan mekanisme kontrak yang didesain untuk mengurangi *agency problems*. Secara umum tidak ada perusahaan yang tidak memiliki biaya keagenan kecuali bagi perusahaan yang dimiliki dan dikelola sepenuhnya oleh seorang manajer (Jensen dan Meckling, 1976).

2.1.3. Earning Management

Salah satu tindakan yang dapat dilakukan manager dengan memanfaatkan adanya asimetri informasi dan munculnya perilaku oportunistik untuk memaksimalkan kesejahteraan adalah dengan cara memodifikasi laba atau dikenal dengan istilah manajemen laba (*earning management*).

Ada beberapa pendapat mengenai definisi dari *earning management*. Scott (2003) mendefinisikan *earning management* atau manajemen laba sebagai suatu

pilihan yang dilakukan oleh manajer dalam menentukan kebijakan akuntansi untuk mencapai beberapa tujuan tertentu.

Sedangkan Sugiri (1998), mendefinisikan manajemen laba dalam dua definisi yaitu:

a. Manajemen laba dalam pengertian sempit

Dalam pengertian ini, manajemen laba hanya berkaitan dengan pemilihan metode akuntansi dengan menggunakan komponen diskresionari akrual dalam menentukan besarnya laba yang akan disajikan.

b. Manajemen laba dalam pengertian luas

Dalam pengertian ini, manajemen laba merupakan tindakan manajer untuk meningkatkan atau mengurangi laba saat ini, tanpa mengakibatkan peningkatan atau penurunan profitabilitas ekonomi jangka panjang.

Dengan mengacu pada teori keagenan, tindakan manajemen laba merupakan salah satu bentuk *moral hazard* yang dilakukan pihak manajemen yang bertujuan untuk memaksimalkan utilitas manajemen seperti pemberian bonus, mempengaruhi keputusan pelaku pasar modal, dan menghindari biaya politik.

Zimmerman (1986) dalam Sulistyanto (2008), terdapat tiga hipotesis utama dalam *Positive Accounting Theory* dapat dijadikan dasar dalam pengembangan motivasi manajemen laba yaitu:

a. *Bonus Plan Hypothesis*

Bonus Plan Hypothesis menyatakan bahwa manager dalam perusahaan yang merencanakan bonus akan cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba yang dilaporkan pada periode berjalan.

b. *Debt (Equity) Hypothesis*

Debt (Equity) Hypothesis menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki rasio *debt to equity* lebih luas, managernya akan cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba. Dalam konteks perjanjian hutang, manager akan mengelola dan mengatur labanya agar kewajiban hutangnya yang seharusnya diselesaikan pada tahun tertentu dapat ditunda hingga tahun berikutnya.

c. *Political Cost Hypothesis*

Political Cost Hypothesis menyatakan bahwa daripada perusahaan kecil, perusahaan yang lebih besar akan cenderung menggunakan pilihan akuntansi yang menurunkan laba yang dilaporkan. Hal ini berkaitan dengan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, contohnya adalah undang-undang yang mengatur besarnya pajak yang ditarik sesuai dengan prosentase laba yang diperoleh.

Menurut Scott (2000) dalam Andayani (2010) terdapat beberapa motivasi yang mendorong manajemen melakukan *earning management* antara lain:

1. Motivasi bonus. Motivasi bonus merupakan salah satu dorongan bagi manager dalam melaporkan laba perusahaan, jika perusahaan tersebut mempunyai kebijakan dalam pencapaian laba tertentu.

2. Motivasi kontrak. Hal ini berkaitan dengan utang jangka panjang, yaitu manajer menaikkan laba bersih untuk mengurangi kemungkinan perusahaan mengalami *technical default*.
3. Motivasi politik. Aspek politik sangat berpengaruh, terutama pada perusahaan besar dan industri yang menguasai hajat hidup orang banyak.
4. Motivasi pajak. Pajak merupakan salah satu alasan dalam pengurangan laba yang dilaporkan.
5. Pergantian CEO (*Chief Executive Officer*). CEO yang akan pensiun biasanya akan berusaha untuk meninggikan laba untuk mendapatkan bonus yang lebih tinggi. Meninggikan laba juga terjadi pada CEO yang memiliki kinerja yang buruk. Hal ini dilakukan guna menghindari pemecatan.
6. Penawaran saham perdana (IPO). Dalam penawaran saham perdana, informasi yang disediakan adalah penting bagi calon investor. Informasi tersebut penting karena dapat dimanfaatkan sebagai sinyal kepada investor potensial terkait dengan nilai perusahaan (Wijana, 2006).

Menurut Scoot (2000) dalam Andayani (2010) terdapat beberapa pola dalam melakukan *earning management* yaitu:

1. *Taking a bath*.

Terjadinya *taking a bath* terjadi pada periode reorganisasi, termasuk pengangkatan CEO yang baru. Bila perusahaan menginginkan laba yang tinggi, manajer dipaksa untuk melaporkan laba yang tinggi. Konsekuensi yang bisa dilakukan manajer adalah dengan menghapus aktifa dengan harapan laba yang akan datang meningkat.

2. *Income minimization.*

Pada pola ini manajer mendapatkan laba tinggi dengan mempercepat penghapusan aktiva tetap dan aktiva tak berwujud dan mengakui pengeluaran-pengeluaran sebagai biaya. Pada saat profitabilitas perusahaan sangat tinggi, hal ini dimaksudkan agar tidak mendapat perhatian secara politis.

3. *Income maximization.*

Tindakan ini bertujuan untuk melaporkan *net income* yang tinggi untuk tujuan bonus yang lebih besar. Perencanaan bonus yang didasarkan pada data akuntansi mendorong manajer untuk memanipulasi data akuntansi guna menaikkan laba untuk meningkatkan pembayaran bonus tahunan. Tindakan ini dilakukan pada saat laba perusahaan menurun.

4. *Income smoothing.*

Hal ini dilakukan dengan meratakan laba yang dilaporkan dengan tujuan untuk pelaporan eksternal, terutama bagi investor, karena pada umumnya investor lebih menyukai laba yang relatif stabil.

Tindakan *earning management* yang dilakukan pihak manajemen perusahaan dapat berakibat berkurangnya kredibilitas laporan keuangan sebagai media komunikasi antara penyaji laporan keuangan dengan pengguna laporan keuangan guna dalam pengambilan keputusan. Contoh tipe dari tindakan *earning management* yang dilakukan adalah penyajian kembali laporan keuangan.

Penyajian Kembali Laporan Keuangan (Restatement)

Dalam penyajian laporan keuangan, tidak jarang akuntan akan menemukan hal-hal yang memerlukan perubahan yang perlu untuk direvisi sehingga laporan keuangan perlu disajikan kembali. Perubahan-perubahan tersebut bisa disebabkan karena kesalahan perhitungan, perubahan kebijakan akuntansi, penerapan peraturan baru, hingga karena kelalaian dan kecurangan yang dilakukan pihak manajemen.

Berdasarkan PSAK no. 25 tentang “Laba atau Rugi Bersih Periode Berjalan, kesalahan Mendasar, dan Perubahan Kebijakan Akuntansi” terdapat beberapa faktor utama yang mempengaruhi penyajian kembali laporan keuangan, khususnya pada Laporan Laba Rugi. Berikut merupakan faktor utama penyajian kembali laporan keuangan sehingga laporan keuangan harus disajikan secara retrospektif:

a. Kesalahan Mendasar

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan yang mungkin timbul adalah kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan, atau kelalaian. Koreksi atas kesalahan tersebut biasanya dimasukkan dalam perhitungan laba atau rugi bersih untuk periode berjalan. Pertanggungjawaban atas kesalahan mendasar dapat dilakukan dengan menyatakan kembali informasi yang berkaitan secara komparatif.

b. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Pemakai laporan keuangan harus dapat memperbandingkan laporan keuangan suatu perusahaan selama beberapa periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan tersebut. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode. Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan jika penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi keuangan yang berlaku, atau jika diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan penyajian kejadian atau transaksi yang lebih sesuai dalam laporan keuangan suatu perusahaan.

Dampak perubahan kebijakan akuntansi atau koreksi atas kesalahan mendasar harus diperlakukan secara retrospektif dengan melakukan penyajian kembali (*restatement*) untuk periode yang telah disajikan sebelumnya dan melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode sajian suatu penyesuaian pada saldo laba awal periode (Bapepam, 2000).

Tindakan *restatement*, terutama *earning restatement*, mulai menarik perhatian beberapa peneliti sejak skandal-skandal akuntansi yang dilakukan oleh *massive companies* terkuak. Agrawal dan Chada (2005) menyatakan adanya relevansi tentang ketidakandalan laba yang dilaporkan yang terus meningkat, dibuktikan dengan kekhawatiran yang disebabkan karena meningkatnya frekuensi *earning restatement* oleh perusahaan beberapa tahun terakhir. Lemahnya pengawasan internal ditengarai sebagai penyebab dari meluasnya kegagalan pelaporan keuangan ini.

Lebih jauh, Zoe-Vonna Palmrose dan Susan (2004) dalam Agrawal dan Chada (2005) juga menjelaskan tentang hubungan antara tata kelola perusahaan dengan *earning restatement*. Yang pertama, tidak seperti manajemen laba yang mana banyak perusahaan mungkin terikat rutin dengan kegiatan ini dalam berbagai derajat, kesalahan penyajian laba merupakan kejadian yang langka dan merupakan kejadian serius dalam perusahaan. Banyak perusahaan yang setelah melakukan *restatement* selanjutnya berakhir dengan kebangkrutan. Yang kedua, pengukuran dari *earning restatement* adalah suatu konstruksi yang akademis, “tak ada asap tanpa api”, hal ini menunjukkan bahwa laba memang dimanipulasi oleh manajer. Dari penjelasan tersebut, tindakan *earning restatement* dianggap sebagai tindakan manajemen laba yang agresif (Li et al., 2006).

2.1.4 Good Corporate Governance

Isu *corporate governance* sudah lama dikenal di Negara Eropa dan Amerika dengan adanya konsep pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan (Arifin, 2005). Konsep pemisahan kepemilikan dan pengendalian perusahaan tersebut sebelumnya telah dijelaskan dalam Teori Agensi.

Kebutuhan akan adanya *good corporate governance* semakin meningkat sejak terungkapnya skandal-skandal akuntansi yang menyebabkan hancurnya beberapa perusahaan besar seperti Enron, World Com dan Merck. Lin *et al.*,(2006) mengungkapkan, sejak nilai perusahaan dihubungkan dengan pelaporan angka laba, hal ini menciptakan insentif ekonomi atau tekanan bagi manajemen untuk berserikat sengan manajemen laba.

Konsep Good Corporate Governance pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Committee pada tahun 1992 dalam laporannya yang dikenal sebagai Cadbury Report (Tjager dkk., 2003 dalam Arifin, 2005). Menurut Cadbury Committee, Corporate Governance adalah:

“Corporate governance is the system by which companies are directed and controlled. Boards of directors are responsible for the governance of their companies. The shareholders’ role in governance is to appoint the directors and the auditors and to satisfy themselves that an appropriate governance structure is in place.”

Sedangkan KNKG mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan guna memberikan nilai tambah pada perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang saham, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku.

Menurut KNKG dalam Pedoman Umum Good Governance, terdapat lima asas dalam menerapkan GCG, yaitu:

1. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi memiliki prinsip dasar untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas memiliki prinsip dasar bahwa perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Responsibilitas memiliki prinsip dasar bahwa perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4. Independensi (*Independency*)

Independensi memiliki prinsip dasar bahwa untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Kewajaran dan kesetaraan memiliki prinsip dasar bahwa dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Menurut IICG (Indonesian Institute for Corporate Governance) dalam Trihartati (2008), terdapat tujuh dimensi GCG yang diambil dari panduan yang

telah ditetapkan OECD dan Komnas GCG. Tujuh dimensi tersebut adalah komitmen terhadap tata kelola perusahaan, tata kelola dewan komisaris, komite-komite fungsional, dewan direksi, transparansi dan akuntabilitas, perlakuan terhadap pemegang saham dan peran pihak berkepentingan lainnya. Salah satu komite fungsional dalam dimensi penerapan GCG tersebut adalah komite audit (Trihartati, 2008).

2.1.5 Komite Audit

Salah satu alat untuk menerapkan *Good Corporate Governance* adalah dengan adanya komite audit yang efektif. Beberapa peraturan yang mengatur keberadaan Komite audit adalah sebagai berikut:

1. Surat Edaran BAPEPAM SE03/PM/2000 mengenai pembentukan Komite Audit pada semua perusahaan publik, yang selanjutnya keanggotaannya dijabarkan dalam Surat Edaran Bursa Efek Jakarta No. SE008/BEJ/12-2001.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
3. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-305/BEJ/07-2004 tentang pencatatan saham dan efek bersifat ekuitas selain saham yang diterbitkan oleh perusahaan tercatat.
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006.
5. Pedoman Good Corporate Governance.

Komite Audit adalah suatu komite yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang, dimana Ketua Komite Audit tersebut berasal dari komisaris dan merupakan Komisaris Independen Perusahaan Tercatat (Bapepam, 2001).

Hiro Tugiman (1995) mendefinisikan Komite Audit sebagai sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota Dewan Komisaris perusahaan klien yang bertanggung jawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen.

Secara garis besar tugas dari Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan atas kinerja perusahaan. Hal tersebut terutama berkaitan dengan *review system* pengendalian intern perusahaan, memastikan kualitas laporan keuangan dan meningkatkan efektivitas fungsi audit (IKAI, 2004). KNKG menetapkan tiga garis besar dari tujuan dibentuknya Komite Audit, yaitu: (1). Pelaporan Keuangan, (2). Manajemen risiko dan control dan (3). *Corporate Governance*.

2.1.5.1 Karakteristik Komite Audit

Dalam Pedoman Komite Audit yang Efektif, dijelaskan pula tentang syarat-syarat anggota Komite Audit yaitu:

1. Anggota Komite Audit harus memiliki suatu keseimbangan ketrampilan dan pengalaman dengan latar belakang usaha yang luas.
2. Anggota Komite Audit harus independen, objektif dan profesional.
3. Anggota Komite Audit harus mempunyai integritas, dedikasi, pemahaman organisasinya, pemahaman yang baik tentang lingkungan bisnisnya dan pemahaman mengenai risiko dan kontrol.
4. Paling sedikit 1 anggota Komite Audit harus mempunyai pengertian baik tentang pelaporan keuangan.

5. Selain syarat-syarat keanggotaan tersebut di atas, Ketua Komite Audit harus mempunyai kemampuan untuk memimpin dan ketrampilan berkomunikasi dengan baik.

Selain syarat-syarat di atas, pada Surat Keputusan Bapepam Kep-29/PM/2004 menambahkan bahwa anggota komite audit merupakan pihak yang tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten, tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten, dan tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua dengan Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham Utama Emiten. Hal ini disyaratkan guna untuk menjaga independensi komite audit.

2.1.5.2 Independensi Komite Audit

Independensi adalah faktor yang penting dalam komite audit. Dengan independensinya, komite audit diharapkan dapat mengatasi konflik kepentingan oleh auditor luar yang menyediakan jasa konsultasi bagi perusahaan (Agrawal *et al.*, 2005), serta dapat melakukan penilaian terhadap efektivitas fungsi internal audit, independensi dan obyektifitas eksternal auditor yang melakukan audit (IKAI, 2004).

Berdasarkan Surat Edaran Bapepam Nomor SE008/BEJ/12-2001, independensi dapat diartikan sebagai pihak diluar perusahaan tercatat yang tidak memiliki hubungan usaha dan afiliasi dengan: (1). Perusahaan tercatat, (2). Komisaris, (3). Direksi dan (4). Pemegang saham utama perusahaan tercatat, dan

mampu memberikan pendapat professional secara bebas sesuai dengan etika profesionalnya dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

2.1.5.3 Ukuran Komite Audit

Ukuran suatu komite audit dapat dilihat dari jumlah keanggotaan komite audit termasuk ketua komite audit. Jumlah efektif yang direkomendasikan KNKG adalah 3-5 orang (KNKG, 2002). Namun demikian, berbeda dengan KNKG, penelitian Carcello et al., (2008) menggunakan rentang efektif sebesar 6-9 anggota dengan alasan untuk keanggotaan yang besar akan mengalami adanya free-rider dan masalah koordinasi, sedangkan untuk keanggotaan kecil dapat mengalami kekurangan sumber daya manusia dalam pendistribusian tugas. Braiotta (2000) dalam Abbott et al.,(2002) menyatakan bahwa, “Secara umum, komite audit seharusnya cukup luas untuk memiliki anggota dengan bauran pertimbangan bisnis dan pengalaman yang baik. Cukup luas, tetapi tidak memberatkan.”

2.1.5.4 Keahlian Keuangan Komite Audit

Karena laporan keuangan adalah objek *oversight* komite audit, selain independensi, keahlian di bidang akuntansi dan keuangan juga menjadi perhatian bagi media dan regulator. Dengan adanya keahlian keuangan, komite audit diharapkan dapat menguatkan dan meyakinkan adanya sistem internal kontrol perusahaan yang baik yang selanjutnya ikut berkontribusi dalam keandalan dan relevansi pelaporan keuangan (Qin, 2007).

Dalam suatu komite audit, paling tidak satu orang anggotanya diharapkan memiliki keahlian di bidang keuangan, paling tidak dalam membaca suatu laporan

keuangan. Tanpa adanya keahlian di bidang akuntansi dan keuangan, komite audit akan kurang mampu dalam mendeteksi masalah dalam pelaporan keuangan (Agrawal, 2005).

SEC seksi 407 dalam Carcello et al. (2006) mendefinisikan keahlian keuangan adalah memiliki (a). Pemahaman atas GAAP dan laporan keuangan, (b). Pengalaman mengaplikasikan GAAP dalam hubungannya dengan estimasi untuk akuntansi, akrual, dan penyajian laporan keuangan (c). Pengalaman dalam persiapan atau pengauditan laporan keuangan terbitan yang dapat dibandingkan secara umum; (d). Pengalaman dengan kontrol internal akuntansi; dan (e). Pemahaman fungsi komite audit.

Abbott, Parker, dan Peters (2004) mendefinisikan keahlian keuangan sebagai CPA, *investment banker*, *venture capitalist*, CFO, *controller*, atau seseorang yang pernah memegang posisi manager senior (CEO, President, EVP, SVP, VP) dengan tanggung jawab keuangan.

2.1.5.5 Pertemuan Komite Audit

Adanya independensi yang baik dan *financial expertise* yang baik akan semakin lengkap dan efektif dengan adanya keaktifan komite audit dalam mengadakan pertemuan (rapat).

Komite Audit mengadakan pertemuan rapat setidaknya tiga bulan sekali. Salah satu bahasan yang dibahas dalam pertemuan ini adalah bahasan tentang fungsi komite audit dalam mengawasi fungsi auditor internal perusahaan (IKAI, 2007). Dalam suatu pertemuan rapat komite audit, komite audit dapat juga berdiskusi langsung dengan pihak lainnya seperti auditor internal, auditor

eksternal maupun pihak manajemen. Setidaknya setiap tahun komite audit yang diwakili oleh Ketua Komite Audit akan menyampaikan laporan tahunan mereka kepada Dewan Komisaris.

Pertemuan efektif komite audit secara teratur untuk menjamin proses pelaporan berfungsi secara tepat, dan oleh karena itu komite audit yang berfungsi dengan baik dan aktif mungkin mampu untuk mencegah manajemen laba (Zhou et. al., 2004).

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menguji mekanisme komite audit dalam mencegah skandal akuntansi, terutama untuk mencegah manajemen laba.

Penelitian Abbott, Parker, dan Peters (2002) meneliti tentang karakteristik komite audit (independensi, keahlian keuangan, ukuran komite audit, kontrol terhadap auditor eksternal dan jumlah pertemuan komite audit) terhadap salah saji keuangan. Dari penelitian tersebut, Abbott menemukan bahwa independensi dan jumlah pertemuan komite audit memiliki hubungan negatif dengan keterjadian pelaporan keuangan yang disajikan kembali.

Penelitian Agrawal dan Chadha (2005) menguji mekanisme *corporate governance* dalam hubungannya dengan kemungkinan penyajian kembali laba perusahaan. Penelitian ini menggunakan *earning restatement* sebagai variabel independennya. Sedangkan variabel independennya adalah independensi direksi dan komite audit, keahlian financial direksi dan komite audit, konflik auditor,

pengaruh CEO terhadap direksi dan mekanisme tata kelola yang lain. Sampel yang digunakan adalah 159 perusahaan public di Amerika Serikat yang menyajikan kembali labanya. Hasil penelitian tersebut adalah tidak ditemukan hubungan antara kemungkinan *restatement* dengan independensi direksi dan komite audit. Namun, Agrawal menemukan adanya kemungkinan signifikan yang lebih kecil di perusahaan yang direksi dan komite auditnya memiliki direksi independen yang memiliki keahlian *financial*.

Carcello, et al., (2008) juga meneliti hubungan antara keahlian keuangan komite audit dan mekanisme tata kelola perusahaan terhadap manajemen laba. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa tidak terdapat asosiasi antara keahlian keuangan dengan manajemen laba. Penelitian ini menyarankan bahwa alternative pendekatan tata kelola sama-sama efektif dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan.

Pada penelitian Zhou dan Chen (2004) yang lebih khusus, yaitu manajemen laba pada perbankan, di temukan bahwa terdapat hubungan negatif antara jumlah pertemuan komite audit, keahlian tata kelola komite audit dan pertemuan direksi dengan manajemen laba pada perbankan.

Di Indonesia, Agung Suaryana (2005) meneliti tentang pengaruh komite audit terhadap kualitas laba. Suaryana menggunakan koefisien respon laba sebagai proksi dari kualitas laba dan karakteristik komite audit yang digunakan adalah independensi, aktivitas, dan ukuran komite audit.

Trihartati (2008) telah meneliti hubungan tentang beberapa karakteristik komite audit terhadap manajemen laba. Karakteristik komite audit yang

digunakan adalah independensi, keahlian keuangan, frekuensi pertemuan dan komitmen waktu komite audit. Sedangkan penggunaan diskresioner akrual sebagai proksi dari manajemen laba yang juga merupakan variabel terikatnya. Berdasar hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa independensi komite audit secara signifikan berpengaruh negatif terhadap tingkat manajemen laba.

Tabel 2.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Variabel	Alat Analisis	Hasil
1.	Xie, Biao dan Davidson III, Wallance N (2001).	Earnings Management and Corporate Governance: The Roles of The Board and The Audit Committee	Dependen variabel: earning management. Independen Variabel: komposisi dewan, struktur dewan, ukuran komite audit dan jumlah pertemuan komite audit	Multiple regression dan univariate regression	Independensi, keahlian dibidang keuangan dan pertemuan komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba.
2.	Abbott, Parker, dan Peters (2002)	Audit Committee Characteristic and Financial Misstatement	Dependen: Salah saji keuangan. Independen: Independensi, keahlian keuangan, ukuran komite audit, kontrol terhadap auditor eksternal, pertemuan komite audit	Logistik regresi	Independensi, jumlah pertemuan komite audit dan keahlian <i>financial</i> berpengaruh negatif terhadap <i>financial misstatement</i> .
3.	Carcello, Klein, dan	Audit Committee	Dependen: diskresioner	Regresi	Diskresioner akrual menurun

	Neal (2008)	Financial Expertise, Competing Corporate Governance Mechanisms, and Earning management in a Post-SOX World	akrual Independen: keahlian keuangan semua tipe, keahlian keuangan tipe I dan keahlian keuangan tipe II		setelah komite audit memiliki anggota yang mempunyai keahlian keuangan.
4.	Zhou dan Chen (2004)	Audit Committee, Board Characteristics and Earnings Management by Commercial Banks	Dependen: manajemen laba (menggunakan proksi Loan Loss Provision). Independen: Peran komite audit (independensi, <i>financial expertise</i> , <i>governance expertise</i> , ukuran, jumlah pertemuan komite audit), dan peran dewan direktur (ukuran, independensi, dan jumlah pertemuan).	Regresi	Jumlah pertemuan komite audit, <i>governance expertise</i> komite audit, dan jumlah pertemuan dewan direksi memiliki hubungan negatif terhadap manajemen laba di sektor perbankan.
5.	April Klein (2000)	Audit Committee, board of Director Characteristics, and Earnings Management	Dependen: Manajemen laba (menggunakan proksi diskresioner akrual) Independen: independensi komite audit, independensi	Regresi	Adanya hubungan negatif antara independensi komite audit dengan manajemen laba.

			dewan direksi, dan kepemilikan saham oleh direksi yang juga bergabung dalam komite audit.		
6.	Agrawal dan Chadha (2005)	Corporate Governance and Accounting Scandals	Dependen: Earning Restatement Independen: Independensi dewan direksi dan komite audit, <i>financial expertise</i> dewan direksi dan komite audit, independensi auditor.	Logistik Regresi	Tidak terdapat hubungan antara <i>earning restatement</i> dengan independensi dewan, komite audit dan independensi auditor.
7.	Lin, Jerry W; June F Li dan Joon S Yang (2006).	The Effect of Audit Committee Performance on Earning Quality	Dependen: Manajemen Laba (menggunakan proksi earning restatement) Independen: Independensi, Ukuran, <i>Financial expertise</i> , dan jumlah rapat komite audit	Logistic Regresi	Ukuran komite audit memiliki hubungan negatif dengan keterjadian <i>earning restatement</i> .
8.	Suaryana, Agung (2008)	Pengaruh komite Audit terhadap Kualitas Laba	Dependen: Koefisien Respon Laba Independen: Perusahaan yang telah memenuhi persyaratan komite audit	Regresi Linier	Koefisien respon laba perusahaan yang memiliki komite audit lebih besar daripada perusahaan yang tidak memiliki komite audit.
9.	Trihartati, Apriliya	Pengaruh Independensi	Dependen: Manajemen	Regresi Berganda	Independensi komite audit

	dan Pamudji, Sugeng (2008)	dan Efektivitas Komite Audit terhadap Manajemen Laba	laba (menggunakan proksi diskresioner aktual). Independen: independensi, financial expertise, frekuensi pertemuan dan komitmen Komite Audit		secara signifikan berpengaruh negatif terhadap tingkat manajemen laba.
--	----------------------------	--	---	--	--

2.2 Kerangka Penelitian

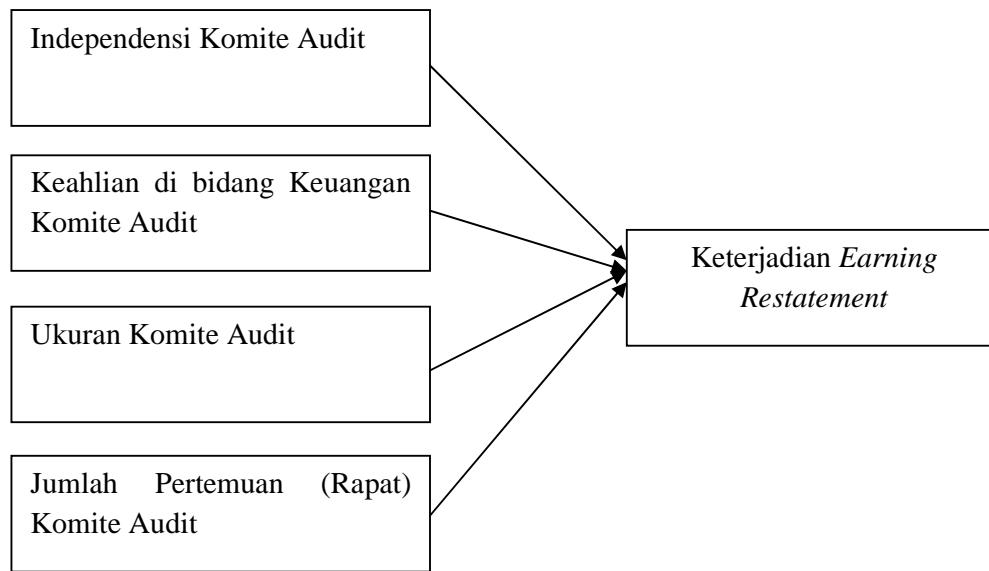
Peran komite audit dalam menegakkan good corporate governance semakin diperhatikan, terutama sejak meningkatnya kasus-kasus skandal akuntansi yang merupakan akibat dari lemahnya penerapan *corporate governance*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keefektifan komite audit dalam mengeliminasi tindakan manajemen laba.

Untuk mengukur keefektifan komite tersebut digunakan beberapa karakteristik dari komite audit yang merupakan karakteristik penentu keefektifan komite audit. Karakteristik tersebut adalah independensi, keahlian di bidang keuangan, ukuran komite audit dan jumlah pertemuan (rapat) komite audit.

Sedangkan untuk mengobservasi tindakan manajemen laba, penelitian ini menggunakan *earning restatement* sebagai proksi dari manajemen laba. Penggunaan *earning restatement* ini karena selain lebih mudah diobservasi, *earning restatement* juga dianggap sebagai suatu bentuk tindakan manajemen laba yang agresif.

Berikut ini adalah bagan yang menggambarkan adanya hubungan negatif antara karakteristik komite audit dengan keterjadian *earning restatement*.

Gambar: 2.1 Hubungan Antar Variabel



2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Independensi Komite Audit dan Keterjadian *Earning Restatement*

Syarat utama anggota komite audit adalah adanya independensi komite audit. Independensi diperlukan untuk menilai keefektifan auditor internal dan untuk menilai independensi dan objektivitas auditor eksternal. Dengan semakin banyaknya anggota komite audit yang independen diharapkan kualitas laporan keuangan akan semakin baik. Beberapa penelitian juga menunjukkan adanya hubungan negatif antara independensi komite audit dengan keterjadian *earning restatement*. Untuk menguji hubungan tersebut, dibuat hipotesis sebagai berikut:

*H1 : Terdapat pengaruh negatif yang signifikan antara independensi komite audit terhadap keterjadian *earning restatement*.*

2.3.2 Ukuran Komite Audit dan Keterjadian *Earning Restatement*

Pedoman pembentukan komite audit telah mengatur tentang jumlah minimum anggota komite audit, yaitu tiga orang. Menurut KNKG, untuk membangun komite audit yang efektif, rentang jumlah anggota yang diperlukan adalah 3 – 5 orang. Sedangkan menurut Carcello et al., (2008) rentang yang efektif adalah sebesar 6 – 9 orang, karena komite audit yang terlalu kecil akan mengalami kesulitan dalam pendistribusian kerja.

Dalam penelitian sebelumnya, terdapat hasil yang tidak konsisten. Xie et al. (2003) tidak menemukan hubungan yang signifikan antara jumlah anggota komite audit dengan manajemen laba. Seperti halnya Xie, Abbott et al. (2004) juga tidak menemukan adanya dampak ukuran komite audit terhadap *earning restatement*. Di sisi lain, berbeda dengan penelitian sebelumnya, Yang dan Krishnan (2005) menemukan bahwa ukuran komite audit memiliki hubungan negatif dengan manajemen laba.

Untuk menguji hubungan antara ukuran komite audit dengan keterjadian *earning restatement*, penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut:

*H2 : Terdapat pengaruh negatif yang signifikan antara ukuran komite audit dengan keterjadian *earning restatement*.*

2.3.3 Keahlian di Bidang Keuangan dan keterjadian *Earning Restatement*

Laporan keuangan merupakan objek oversight dari komite audit. Oleh karena itu dalam suatu keanggotaan komite audit harus terdapat sekurang-kurangnya satu anggota yang memiliki keahlian di bidang keuangan. Hal ini diperlukan supaya komite audit mampu mendeteksi adanya masalah dalam pelaporan keuangan, termasuk mendeteksi kemungkinan kecurangan yang dilakukan manajemen yang dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan.

Untuk menguji hubungan antara *financial expertise* komite audit dengan keterjadian *earning restatement*, penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Terdapat pengaruh negatif yang signifikan antara keahlian keuangan komite audit dengan keterjadian earning restatement.

2.3.4 Jumlah pertemuan (rapat) Komite Audit dengan Keterjadian *Earning Restatement*

Dalam melakukan fungsi komite audit sebagai pengawas, baik itu pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan, manajemen risiko dan kontrol juga penegakan *corporate governance*, komite audit akan memerlukan pertemuan-pertemuan untuk membahas temuan-temuan yang perlu dievaluasi. Pertemuan ini dilakukan paling sedikit tiga bulan sekali, dan setahun sekali komite audit akan melaporkan kinerjanya kepada Dewan Komisaris. Adapun pihak-pihak lain yang berhubungan dengan komite audit antara lain pihak auditor eksternal, auditor internal, dan pihak manajemen.

Jumlah pertemuan (rapat) komite audit juga digunakan sebagai parameter keaktifan komite audit. Semakin sering komite mengadakan pertemuan diharapkan akan menurunkan tingkat kecurangan pada manajemen. Untuk menguji hubungan pertemuan komite audit dengan keterjadian *earning restatement*, maka dituliskan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Terdapat pengaruh negatif yang signifikan antara jumlah pertemuan (rapat) komite audit dengan keterjadian earning restatement.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Terdapat beberapa variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel-variabel tersebut adalah *independent variable*, *dependent variable*, dan *control variable*. *Dependent variable* atau variabel yang menjadi objek dari penelitian ini adalah keterjadian penyajian kembali laba (*earning restatement*). Sedangkan *independent variable* dalam penelitian ini adalah independensi komite audit, ukuran komite audit, keahlian di bidang keuangan anggota komite audit dan frekuensi pertemuan (rapat) komite audit. Selain itu, dalam penelitian ini juga terdapat *control variable* yang digunakan untuk menjaga pengaruh *independent variable* terhadap *dependent variable*. *Control variabel* yang digunakan dalam penelitian ini adalah penggunaan jasa audit eksternal yang berasal dari kantor akuntan Big 4 atau yang berasal dari kantor akuntan non-Big 4, arus kas dari aktivitas operasi (*cashflow from operating activities*), dan total akrual perusahaan.

3.1.1. Dependent Variable (Variabel Terikat)

Variabel terikat merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti (Sekaran, 2006). Variabel ini merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Melalui analisis terhadap variabel terikat ini (yaitu menemukan variabel yang mempengaruhinya) adalah mungkin untuk menemukan jawaban atas solusi atau masalah (Sekaran, 2006). Dalam penelitian ini, variabel terikatnya adalah adanya keterjadian penyajian kembali laba (*earning restatement*) pada

perusahaan *go public* yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. *Earning restatement* ini merupakan proksi dari manajemen laba.

Adapun alasan penggunaan *earning restatement* sebagai proksi dari manajemen laba antara lain adalah karena manajemen laba adalah objek yang tidak teramati (Li et.al.,2006). Oleh karena itu, dalam melakukan pengukuran terhadap manajemen laba, manajemen laba tersebut akan diwakilkan dengan proksi-proksi yang lebih dapat teramati seperti berbagai jenis ukuran diskresioner akrual dan *earning restatement*. Kedua, beberapa peneliti menggunakan proksi *earning restatement* karena merupakan ukuran dari tindakan agresif manajemen laba yang lebih dapat teramati (Lin et.al., 2006).

Variabel terikat dalam penelitian ini merupakan variabel dummy karena terdiri dari dua kategori. Menurut Ghazali (2006), cara pemberian kode dummy umumnya menggunakan kategori yang dinyatakan dengan angka 1 atau 0. Pada penelitian ini, perusahaan yang melakukan *earning restatement* akan diberi kode 1, sedangkan perusahaan yang tidak melakukan *earning restatement* diberi kode 0.

3.1.2. Variabel Bebas (Independent variable)

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat, entah secara positif maupun negatif (Sekaran, 2006). Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah independensi komite audit, ukuran komite audit, keahlian di bidang keuangan komite audit dan frekuensi pertemuan (rapat) komite audit.

3.1.2.1. Independensi Komite Audit (INDD)

Salah satu elemen penting dalam keanggotaan komite audit adalah independensi. Berdasarkan Keputusan Bapepam Kep-29/PM/2004 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit dijelaskan bahwa suatu komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang Komisaris Independen dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota lainnya berasal dari luar Emiten atau perusahaan Publik.

Variabel ini merupakan variabel dummy. Nilai “1” digunakan jika seluruh anggota komite audit adalah independen dan nilai “0” jika tidak semua anggota komite audit adalah independen.

3.1.2.2. Ukuran Komite Audit (SIZE)

Yang dimaksud ukuran komite audit adalah berapa jumlah anggota dari komite audit. Berdasarkan Surat Edaran Bapepam Nomor SE 3/PM/2000, jumlah anggota komite audit sekurang-kurangnya adalah 3 (tiga) orang termasuk ketua komite audit. Namun, KNKG merekomendasikan jumlah anggota komite audit antara 3-5 untuk komite audit yang efektif.

Variabel dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan variabel dummy. Pengkodean ukuran komite audit nilai “1” jika jumlah komite audit antara 3-5 orang yang merupakan rekomendasi jumlah efektif oleh KNKG dan nilai “0” jika tidak.

3.1.2.3. Keahlian di Bidang Keuangan (FINEX)

Keahlian di bidang keuangan (*Financial Expertise*) adalah salah satu syarat dalam keanggotaan komite audit. Setidaknya dalam satu komite audit,

terdapat satu anggota yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi. Hal ini penting, karena salah satu objek yang diawasi oleh komite audit adalah laporan keuangan.

Variabel keahlian dibidang keuangan ini merupakan variabel dummy. Pemberian kode “1” digunakan jika dalam suatu komite audit terdapat setidaknya satu orang anggota yang memiliki keahlian atau pengetahuan dalam bidang keuangan. Sedangkan pemberian kode “0” jika tidak ada anggota dalam komite audit tersebut yang memiliki keahlian atau pengetahuan dalam bidang keuangan.

3.1.2.4. Frekuensi Pertemuan (Rapat) Komite Audit

Sesuai dengan “Pedoman Pembentukan Komite Audit yang Efektif”, suatu komite audit sedikitnya mengadakan rapat sekali dalam tiga bulan. Dalam pertemuan ini akan dibahas kinerja komite audit dalam menjalankan fungsinya, yaitu melakukan pengawasan internal, mengawasi pelaporan keuangan dan memeriksa laporan keuangan, dan yang terakhir adalah mengawasi penerapan tata kelola perusahaan. Komite audit yang aktif, yaitu komite audit yang rajin melakukan pertemuan, akan lebih mampu dalam memonitor terjadinya tindakan manajemen laba.

Variabel dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan jumlah pertemuan (rapat) komite audit dalam satu tahun atau satu periode.

3.1.3 Variabel Kontrol

Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini merupakan proksi-proksi dari kualitas audit dan karakteristik keuangan yang mempengaruhi insentif manajemen dalam mengelola atau memanipulasi laba yang dilaporkan.

Proksi kualitas audit yang digunakan adalah auditor kantor akuntan Big 4 atau non-Big 4. Sedangkan proksi dari karakteristik keuangan yang digunakan adalah arus kas dari aktivitas operasi dan total akrual perusahaan.

3. 1.3.1. Auditor Big 4 dan non-Big 4

Becker et.al (1998) dalam Lin et al., (2006) pada penelitiannya berasumsi bahwa klien auditor non Big 4 lebih memungkinkan melakukan tindakan manajemen laba daripada klien yang menggunakan auditor Big 4.

Variabel ini merupakan variabel dummy, pemberian kode “1” untuk auditor Big 4 dan kode “0” untuk auditor non Big 4.

3. 1.3.2. Arus Kas dari Aktivitas Operasi/Cash Flow Operating Activity (CFO), Total Accrual (TAcc), Absolute Value CFO dan Absolute Value Total Accrual

Beberapa penelitian sebelumnya menggunakan variabel tersebut untuk mengontrol faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi insentif manajemen untuk mengelola atau memanipulasi laba yang dilaporkan (Dechow et al., 1995; Frankel et al., 2002; McNichols, 2000). Matsumoto (2002) dalam Lin et al., (2006) menyatakan bahwa perusahaan dengan prospek pertumbuhan yang tinggi akan lebih sering mengatur labanya.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah dari keseluruhan kelompok individu, kejadian-kejadian yang menarik perhatian peneliti untuk diteliti atau diselidiki (Sekaran,

2006). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan publik yang *listed* di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2005-2009.

Sampel adalah bagian dari populasi yang dinilai dapat mewakili karakteristiknya. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel sesuai dengan kriteria tertentu. Adapun kriteria pengambilan sampel adalah sebagai berikut:

1. Sampel merupakan perusahaan yang menyajikan kembali (*restate*) laporan laba ruginya pada periode 2005-2009.
2. Sampel disaring berdasarkan ketersediaan data komite audit yang diperlukan dimana data tersebut terdapat dalam laporan tahunan perusahaan tahun bersangkutan.
3. Sampel perusahaan yang melakukan *restatement* kemudian dipasangkan dengan perusahaan yang tidak melakukan *restatement* berdasarkan klasifikasi industri dan ukuran perusahaan. Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan menggunakan total asset sebagai ukurannya. Ukuran perusahaan dan klasifikasi industri dapat diperoleh dari *idx statistic* yang tersedia di BEI ataupun Pojok BEI.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu berupa laporan keuangan (*financial statement*) perusahaan tercatat dan laporan tahunannya (*annual report*) periode 2005-2009. Data tersebut diperoleh dengan mengakses situs Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id, situs perusahaan yang bersangkutan atau tersedia juga di Pojok BEI Universitas Diponegoro.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan studi dokumentasi. Studi pustaka adalah metode pengumpulan data dengan mengolah literatur, jurnal, artikel, dan atau penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Studi dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan mengumpulkan data sekunder yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian ini.

3.5 Metode Analisis data

Penelitian ini akan menganalisis hubungan antara *independent variable* terhadap perusahaan yang melakukan *earning restatement* dengan perusahaan yang tidak melakukan *earning restatement*.

3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian. Statistik deskriptif yang digunakan adalah nilai rata-rata, standar deviasi, maksimum, dan minimum untuk menggambarkan variabel independensi komite audit, ukuran komite audit, *financial expertise* komite audit dan jumlah pertemuan (rapat) komite audit.

3.5.2 Pengujian Hipotesis

Pengujian seluruh hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi logistic (*regression logistic*) karena variabel terikatnya merupakan variabel satu non metric dua kategori (Ghozali, 2006). Pada logistik regresi ini tidak diperlukan asumsi normalitas data pada variabel bebasnya.

Model logit digunakan untuk melihat hubungan kemungkinan perusahaan akan melakukan tindakan *earning restatement* pada suatu periode dengan karakteristik komite audit pada periode yang sama. Variabel terikat menggunakan variabel dummy, yaitu apakah perusahaan melakukan *earning restatement* atau tidak. Sedangkan variabel bebas dalam penelitian ini menggunakan model independensi komite audit, ukuran komite audit, *financial expertise* komite audit dan jumlah pertemuan (rapat) komite audit. Perhitungan statistic dan pengujian hipotesis dengan analisis regresi logistic dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan program computer SPSS.

Persamaan yang dibentuk dalam penelitian ini adalah:

$$\begin{aligned} \text{RESTATE} = & \beta_0 + \beta_1 \text{INDP} + \beta_2 \text{SIZE} + \beta_3 \text{FINEX} + \beta_4 \text{MEET} + \beta_5 \text{BIG} \\ & + \beta_6 \text{CFO} + \beta_7 \text{ABSCFO} + \beta_8 \text{TACC} + \beta_9 \text{ABSTACC} + \varepsilon \end{aligned}$$

Dimana

RESTATE = Nilai 1 jika perusahaan melakukan penyajian kembali laporan laba ruginya, dan nilai 0 jika tidak.

INDP = Nilai 1 jika seluruh anggota komite audit adalah independen, dan nilai 0 jika tidak.

SIZE = Nilai "1" jika jumlah komite audit antara 3-5 orang yang merupakan rekomendasi jumlah efektif oleh KNKG dan nilai "0" jika tidak.

FINEX = Nilai 1 jika terdapat minimal satu orang anggota komite audit yang memiliki keahlian dibidang keuangan, dan 0 jika tidak ada anggota komite audit

yang memiliki keahlian di bidang keuangan.

MEET	= Jumlah rapat komite audit selama satu tahun atau satu periode.
BIG	= Nilai 1 jika auditor independen perusahaan tersebut berasal dari kantor akuntan Big 5, dan nilai 0 jika tidak.
CFO	= adalah nilai arus kas yang berasal dari aktivitas operasi perusahaan
ABSCFO	= merupakan nilai absolut dari arus kas yang berasal dari aktivitas operasi perusahaan.
TACC	= merupakan nilai total akrual perusahaan (<i>net income-CFO</i>).
ABSTACC	= merupakan nilai absolute dari nilai Total Akrual perusahaan.
ε	= error

Sebelum melakukan pengujian dengan menggunakan *logistic regression*, terdapat beberapa kondisi yang harus diperhatikan untuk menilai kelayakan model terhadap data. Analisis yang digunakan antara lain :

1. Uji Kelayakan Model

Dalam Ghozali (2007), hipotesis yang digunakan untuk menilai model fit adalah:

H₀ : Model yang dihipotesiskan fit dengan data

H_A : Model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data

Pengujian ini menggunakan Hosmers and Lemeshow's Goodness of Fit Test yang menguji hipotesis nol bahwa data empiris cocok atau sesuai dengan model (Ghozali, 2007). Jika nilai statistic sama dengan atau kurang dari 0.05, maka hipotesis nol ditotal, yang berarti ada perbedaan signifikan antara model dengan nilai obeservasinya sehingga goodness fit model tidak baik karena model tidak dapat memprediksi nilai observasinya.

2. Uji Kelayakan Keseluruhan Model (*Overall Fit Model Test*)

Dalam menilai *overall fit model*, dapat dilakukan dengan beberapa cara. Diantaranya:

a. *Chi Square*

Tes statistik *chi square* digunakan berdasarkan pada fungsi *likelihood* pada estimasi model regresi. *Likelihood* (L) dari model adalah probabilitas bahwa model yang dihipotesiskan menggambarkan data input. L ditransformasikan menjadi $-2\log L$ untuk menguji hipotesis nol dan alternatif. Penggunaan nilai untuk keseluruhan model terhadap data dilakukan dengan membandingkan nilai $-2 \log likelihood$ awal (hasil *block number* 0) dengan nilai $-2 \log likelihood$ hasil *block number* 1. Dengan kata lain, nilai *chi square* didapat dari nilai $-2\log L_1 - 2\log L_0$. Apabila terjadi penurunan, maka model tersebut menunjukkan model regresi yang baik.

b. *Cox and Snell's R Square* dan *Nagelkerke's R square*

Cox dan Snell's R Square merupakan ukuran yang mencoba meniru ukuran *R square* pada *multiple regression* yang didasarkan pada teknik estimasi *likelihood* dengan nilai maksimum kurang dari 1 sehingga sulit diinterpretasikan.

Nagelkerke R square merupakan modifikasi dari koefisien *Cox and Snell R square* untuk memastikan bahwa nilainya bervariasi dari 0 sampai 1. Hal ini dilakukan dengan cara membagi nilai *Cox and Snell R square* dengan nilai maksimumnya. Nilai *nagelkerke's R2* dapat diinterpretasikan seperti nilai *R2* pada *multiple regression* (Ghozali, 2005).

c. Tabel Klasifikasi

Tabel klasifikasi menghitung nilai estimasi yang benar (*correct*) dan salah (*incorrect*). Pada kolom merupakan dua nilai prediksi dari variabel dependen dalam hal ini *earning restatement* (1) dan *tidak earning restatement* (0), sedangkan pada baris menunjukkan menunjukkan nilai observasi sesungguhnya dari variabel dependen. Pada model sempurna, maka semua kasus akan berada pada diagonal dengan ketepatan peramalan 100% (Ghozali, 2005).

3. Pengujian Signifikansi Koefisien Regresi

Pengujian koefisien regresi dilakukan untuk menguji seberapa jauh semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh terhadap kemungkinan perusahaan berada pada kondisi *financial distress*. Koefisien regresi logistik dapat ditentukan dengan menggunakan *p-value* (*probability value*).

- a. Tingkat signifikansi (α) yang digunakan sebesar 5% (0,05).
- b. Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis didasarkan pada signifikansi *p-value*. Jika *p-value* (signifikan) $> \alpha$, maka hipotesis alternatif ditolak. Sebaliknya jika *p-value* $< \alpha$, maka hipotesis alternatif diterima.